

BENTUK HORIZONTAL IKATAN PATRONASE SEBAGAI WUJUD KEKUASAAN PETANI KAYA DI PEDESAAN SULAWESI SELATAN

Iskandar¹, Asmira²

¹Sosiologi Fisipol UNIBOS Makassar, iskandar@universitasbosowa.ac.id

²Sosiologi Fisipol UNIBOS Makassar, asmirah@universitasbosowa.ac.id

ABSTRAK

Salah satu faktor keberhasilan petani kaya kelas patron bertahan di posisi elit struktur kelas di pedesaan Sulawesi Selatan, adalah menciptakan ikatan patronase di level horizontal. Strategi yang dilakukan adalah menggalang aliansi personal dengan sesama elit desa melalui kondisi tertentu, seperti: merger usaha, perkawinan politik dan organisasi. Perkawinan politik misalnya, ini merupakan penyatuan sebuah keluarga sukses (dengan menjodohkan anak atau anggota keluarga yang lain) dengan sesama keluarga sukses lainnya tanpa melihat derajat dan status sosial masing-masing. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus dijelaskan bahwa aliansi personal juga berlangsung di kegiatan sosial ekonomi lainnya, dimana para patron membina hubungan kerja sama dengan para birokrat, aparat, dan lembaga keuangan, demi memperlancar urusan usahanya. Secara kualitatif, penelitian juga menemukan arus horizontal menciptakan aliansi personal di bidang politik ketika wilayah pedesaan menjadi lumbung suara politik. Arah ke aliansi politik, dimana para patron lokal dan pihak-pihak lembaga secara bersama memiliki kepentingan (baik secara struktural maupun fungsional) dalam kekuasaan. Mobilitas patron lokal yang dulunya hanya bergerak di sektor ekonomi, kini melihat Pemilu bebas tersebut sebagai peluang baru untuk melakukan mobilitas horizontal ke kekuasaan dengan kaum birokrat. Aliansi personal versi baru terbentuk, patron lokal yang memiliki massa di ikatan vertikal juga secara horizontal tetap jadi patron karena mampu memobilisasikan power politiknya kepada para aliansinya, dan pihak-pihak lembaga yang hanya memiliki manajemen politik dan minus power politik di pedesaan selanjutnya secara horizontal diintrodusir menjadi klien.

Kata kunci: Horizontal; Patronase; Petani Kaya; Kekuasaan; Sulawesi Selatan

1. PENDAHULUAN

Sebagian besar potensi sumber daya (lahan, keuangan, bisnis, transportasi, perumahan dan teknologi) di pedesaan Sulawesi Selatan itu dikuasai petani kaya atau petani patron. Salah satu strategi yang digunakan dari petani kaya ini adalah melakukan aliansi personal antar petani kaya dengan pejabat, tokoh masyarakat dan petani kaya lainnya. Aliansi personal sebagaimana temuan Walinono (1979:45-49) menyebutkan bahwa ada kebiasaan orang-orang kuat di pedesaan Sulawesi Selatan dalam mempertahankan posisinya sebagai orang yang disegani, yakni melakukan aliansi personal dengan jalan perkawinan politik. Inti perkawinan ini adalah penyatuan sebuah keluarga sukses (dengan menjodohkan anak atau anggota keluarga yang lain) dengan sesama keluarga sukses lainnya tanpa melihat derajat dan status sosial masing-masing. Aliansi personal dalam perkawinan politik ini, juga dibahas oleh Pelras (1981:18-21) yang menyebutkan bahwa aliansi personal itu meluas ketika kriteria askripsi semakin surut oleh kriteria prestasi, dimana aliansi personal melalui perkawinan politik dijadikan jalan pintas oleh orang-orang kuat di pedesaan dalam proses mobilitas sosialnya. Sedangkan menurut Asraf (1989:26-30) bahwa dalam berbagai kepentingan usahanya, para patron membina hubungan kerja sama dengan para birokrat, aparat, dan lembaga keuangan, demi memperlancar urusan

usahanya. Gambaran ini sesuai temuan Boissevain di Italia tahun lima puluhan, menurut Boissevain (1966:23-24) bahwa di Sicilia Italia, para patron di pedesaan melakukan aliansi personal melalui perkawinan politik dan penyatuan sesama keluarga patron lainnya (melalui ikatan bisnis, keamanan, dan politik) demi melebarkan jaringan horizontal sesama orang kaya. Dari berbagai temuan ini dinyatakan bahwa secara horizontal, terciptanya arus hubungan dari patron ke klien adalah melalui aliansi personal.

Selain itu, unsur horizontal yang mesti dimiliki petani kaya adalah menciptakan jaringan kekuatan bersama melalui upaya membangun jaringan koalisi. Temuan Syamsuddin (1990) dan Parakkasi (1992), menyebutkan bahwa jaringan koalisi yang dibangun patron dalam usaha tani berupa jaringan koalisi antar petani kaya pemilik lahan luas dengan petani kaya pemilik produksi dan transportasi, walaupun demikian hubungan yang berlangsung bersifat egaliter dan saling melengkapi. Sifat ganda pelapisan strata ini juga sesuai temuan Parakkasi (1992:66-68), menurutnya bahwa hubungan antar petani pemilik lahan sederhana dengan petani lahan luas adalah bentuk baru dalam sistem pelapisan sosial, walaupun demikian hubungan itu hanya bersifat horizontal dan kesejajaran, dimana yang diutamakan hanyalah memperluas jaringan kerja (jaringan koalisi). Temuan Hayami-Kikuchi (1987) juga mengisyaratkan fenomena ini, dimana jaringan strata tidak mengalami polarisasi tetapi membentuk jaringan melebar, yakni terciptanya lapisan ganda di tingkat patron dan di tingkat petani kelas klien. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mengaktualnya ikatan horizontal dalam arus hubungan dari klien ke patron adalah oleh faktor jaringan koalisi.

Ikatan horizontal merupakan ikatan yang mengaktual setelah ikatan vertikal terdiferensiasi ke bentuk-bentuk lain. Pandangan Lande (1973) dan Legg (1983; 78) menyebutkan bahwa mengaktualkan ikatan horizontal di balik ikatan vertikal adalah karena semakin luasnya jaringan vertikal ketika pihak-pihak yang terlibat dalam ikatan patronase mengakses kepentingan modernisasi. Hal itu menurut Lande (1973; 105) hal itu karena para patron semakin luas kepentingannya dengan kalangan birokrasi dan pekerja profesional lainnya. Sedangkan menurut Powel (1970; 423) adalah karena peran klien semakin diperlukan dalam modernisasi sehingga mendorong obsesinya untuk keluar dari jaringan vertikal. Dari hasil mengkaji perkembangan ikatan patron-klien di berbagai negara, Legg (1983) merumuskan tiga syarat keberadaan seseorang dalam jaringan ikatan horizontal, ketiga syarat itu adalah: (a) Para sekutu (partners) menguasai sistem sumber yang tidak dapat diperbandingkan (noncomparable resources); (b) Hubungan tersebut “mempribadi” (personalized), dan (c) Keputusan untuk mengadakan pertukaran didasarkan pada pengertian saling menguntungkan secara timbal balik (mutual benefit and reciprocity).

Penjelasan masing-masing syarat menurut Legg (1983:10-29) bahwa secara horizontal, pada syarat pertama, seseorang (patron dan klien) diposisikan sebagai sekutu atau rekanan, dimana yang membedakan seseorang sebagai patron adalah karena berada pada peluang yang lebih luas ketimbang klien, sehingga perbedaan yang ada bukanlah berbentuk ketimpangan. Syarat yang kedua adalah hubungan yang mempribadi tidak mesti berbentuk face to face (tatap muka), ikatan patronase dapat tersalurkan melalui alat teknologi ataupun melalui pihak ketiga tanpa merusak ikatan. Syarat ketiga adalah, pertukaran sosial didasarkan atas asas saling berkepentingan, dimana pertukaran cenderung bersifat penyesuaian kepentingan (misalnya hubungan politisi dengan pedagang dalam kepentingan kekuasaan, dimana dalam hal ini sang politis bertindak sebagai patron dan sang pedagang sebagai kliennya).

Perbedaan mendasar antara ikatan horizontal dengan ikatan vertikal menurut Legg (1983; 21) adalah mobilitas sosial dalam ikatan horizontal bersifat simplex atau cepat, sedangkan mobilitas sosial dalam ikatan vertikal bersifat multiplex atau lambat. Sebagai mobilitas sosial yang bersifat simplex, seseorang dalam ikatan horizontal memiliki karakter khusus, yakni seperti: hubungan kekerabatan tidak seakrab dengan hubungan multiplex, hubungan sifatnya fleksibel dan mudah putus ketimbang multiplex (yang erat dan berulang-ulang), hubungan

sifatnya sangat memusat (adanya mata rantai ikatan yang panjang) sedangkan ikatan multiplex lebih sederhana, dan ikatan yang terbentuk lebih mengutamakan perluasan jaringan patronase, sedangkan dalam ikatan multiplex lebih mengutamakan kedalaman jaringan patronase. Dari berbagai perbedaan ini, Legg menyimpulkan bahwa mobilitas sosial dalam ikatan horizontal mengarah ke pola masyarakat modern, sedangkan ikatan vertikal ke pola kehidupan masyarakat tradisional.

Dari berbagai ciri khas tersebut, menurut Legg (1983) bahwa ikatan horizontal juga terakses ke dalam dua arus pertukaran (*elements of exchange*), yakni arus patron ke klien dan arus klien ke patron. Dalam arus patron ke klien, menurut Legg (1983:13) bahwa terdapat dua hal pokok yang dipertukarkan patron untuk menarik minat klien berpatronase, kedua hal itu adalah.

Sumber daya yang ada dalam kekuasaan pribadinya, yakni sumber daya yang dikaitkan dengan kekayaan, status, dan kekuasaan milik pribadinya. Sumber daya ini dipertukarkan ke klien melalui kegiatan-kegiatan umum dan kegiatan usaha bisnis lainnya. Dan sumber daya ini umumnya dimanfaatkan untuk memobilisasi aliansi personal dalam jaringan yang lebih luas. Sumber daya milik seseorang atau lembaga yang dikendalikan oleh patron, yakni jenis sumber daya yang berkaitan dengan jabatan ataupun wewenangnya. Walaupun sumber daya ini melekat sementara pada dirinya, namun secara pribadi seorang patron membangun jaringan koalisi dengan pihak lain yang lebih rendah maupun sederajat, hal ini demi mempertahankan kekuasaannya maupun demi lebih meningkatkan kekuasaan tersebut. Kedua *elements of exchange* ini menurut Legg (1983) berlangsung secara pribadi pada diri seorang patron, adapun jabatan maupun wewenang hanyalah media dalam melakukan *social exchange*. Di samping kedua elemen ini, dalam kajian juga akan mengkombinasikannya dengan konsep Scott, yakni tentang *collective Patron Service*. Hal yang inti dari arus ini menurut Legg (1983) bahwa secara horizontal, pada poin kedua yakni sumber daya milik seseorang atau lembaga yang dikendalikan oleh patron dalam membangun jaringan koalisi, ini dalam kondisi mobilitas sosial tertentu juga berlaku untuk jaringan hubungan dari klien ke patron.

Adapun *elements of exchange* yang mengaktualkan arus hubungan dari klien ke patron, menurut Legg (1983; 33) bahwa yang dipertukarkan klien adalah (1) sumber daya yang lebih rendah ketimbang milik patron, dan (2) sumber daya miliknya memiliki perbedaan bentuk dan jenis ketimbang kepunyaan sang patron. Di samping itu, asas kepatuhan, loyalitas, dan egaliter, menjadi hal yang sangat mendasar dimiliki klien untuk membina hubungan horizontal secara baik dengan patron. Kedua bentuk *elements of exchange* ini juga akan berjalan lancar apabila klien mampu memobilisasi aspek-aspek yang berkaitan aliansi personal serta mampu membentangkan ataupun memobilisasi jaringan koalisi secara luas dan strategis. Menurut Legg (1983; 17) bahwa pada posisi horizontal, motivasi ikatan patronase cenderung diawali oleh pihak patron. Sedangkan pihak klien, setelah menikmati bantuan yang diberikan oleh pihak patron, berupa kebutuhan hidupnya dan berbagai fasilitas peningkatan karir, membuatnya terpengaruh dan selanjutnya terlibat dalam ikatan tersebut. Menurut Blau (1964; 269) bahwa dalam situasi ini, pihak klien berada pada posisi “lambung nilai” di mata patron.

2. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus dalam mengungkap bentuk horizontal dalam ikatan Patronase di pedesaan Sulawesi Selatan. Alasan digunakannya pendekatan ini adalah peneliti ingin menggambarkan lebih mendalam dan kongkrit tentang proses arus hubungan horizontal ikatan patronase di pedesaan Sulawesi Selatan. Jenis penelitian studi kasus biasanya digunakan untuk mengungkapkan makna sosio-kultural dengan cara mempelajari pola hidup serta interaksi antar kelompok sosio kultural (*culture sharing group*) tertentu di dalam sebuah ruang ataupun konteks yang spesifik (Spradley, 1980; Sugiyono, 2010). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berbentuk

wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya kegiatan analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode kategorisasi data dan interpretasi data. Sedangkan waktu penelitian dilakukan selama 6 bulan (dari Januari hingga Juli 2018) dan sampel penelitian yang digunakan adalah model purposive sampling dengan obyek penelitian berada di Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Jeneponto yang mewakili suku Bugis dan suku Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan.

3. HASIL PENELITIAN

Dalam teori ikatan patron-klien, aliansi personal dan jaringan koalisi menurut Legg (1983) adalah wadah pertukaran sosial yang mempertemukan patron dan klien secara horizontal. Sebagai wadah, aliansi personal menukarkan dua hal milik patron dan klien, yakni (1) bagi patron, sumber daya yang dipertukarkan adalah milik pribadinya; dan (2) bagi klien, sumber daya miliknya lebih rendah ketimbang milik patron. Sedangkan pada jaringan koalisi, juga menukarkan dua hal milik patron dan klien, yakni (1) bagi patron, sumber daya yang dipertukarkan adalah milik seseorang atau lembaga yang dikendalikan; dan (2) bagi klien, sumber daya miliknya memiliki perbedaan jenis ketimbang kepunyaan patron. Adapun syarat-syarat ikatan horizontal menurut Legg (1983:28), terdiri dari 3 kondisi, yakni: (1) para sekutu (partners) menguasai sumber-sumber yang tidak dapat diperbandingkan (noncomparable resources); (2) hubungan tersebut mempribadi (personalized); dan (3) keputusan untuk mengadakan pertukaran didasarkan pada pengertian saling menguntungkan secara timbal balik (mutual benefit and reciprocity). Menurut Legg (1983), ketiga syarat ini saling melengkapi satu sama lain dalam membentuk ikatan horizontal dan eskalasinya bergantung ke kondisi ikatan vertikal

Mengacu dari teori di atas, indikasi terhadap kehadiran ikatan patron-klien secara horizontal melalui aliansi personal koalisi, juga mengacu pada perkembangan diversifikasi okupasi para patron dan para klien di dua wilayah. Di data sekunder terindikasi bahwa, aliansi personal adalah bentuk lain dari kegiatan para patron ketika memobilisasi akumulasi kapitalnya dengan personal sederajat demi perluasan kekuasaan. Sedangkan jaringan koalisi adalah bentuk lain dari kegiatan para klien ketika memobilisasi proses realokasi sumber-sumber pendapatannya dengan koalisi terdekat demi perluasan jaringan kerja.

Hubungan dari Patron ke Klien Melalui Arus Aliansi Personal sebagai Wujud Diferensiasi Ikatan Horizontal

Secara horizontal, terstrukturnya pola hubungan dari patron ke klien melalui arus aliansi personal adalah, ketika kalangan patron melakukan persekutuan dengan pihak di lembaga tertentu maupun sesama patron, dalam rangka me-mobilisasi basis kekuasaannya di perdesaan. Adapun pihak-pihak yang diajak beraliansi adalah seseorang yang secara kualitas sumber daya memiliki derajat kekuasaan lebih rendah dari para patron tersebut. Pada bab terdahulu secara eksplisit telah menyinggung eksistensi aliansi personal ini, yakni ketika mobilisasi berbagai usahanya para patron berhubungan dengan para birokrat dan pihak BUMN untuk tujuan kemudahan administrasi dan keuangan, sedangkan mobilisasi dengan sesama patron nampak terwujud ketika intensnya kerja sama dengan patron lain yang lebih rendah derajat kekuasaannya. Untuk mendeskripsikan keterkaitan arus hubungan ini, uraian akan terbagi menjadi dua bagian, yakni (1) aliansi personal sebagai pencetus arus hubungan dari patron ke klien, dan (2) resistensi aliansi personal terhadap ikatan horizontal. Secara ringkas, kedua dijelaskan berikut ini.

Hubungan dengan pihak-pihak di lembaga tertentu sebagai wujud aliansi personal adalah bentuk pertukaran tidak setara dari para patron ke pihak tertentu (pihak yang mewakili

lembaganya) dalam rangka memobilisasikan kekuasaannya demi mencapai kekuasaan yang lebih besar. Dalam prosesnya, menurut Legg (1983) posisi pihak-pihak tertentu tersebut sebagai “child stair of power” (anak tangga kekuasaan) bagi misi kekuasaannya. Adapun arah misi tersebut kecenderungannya mesti ke lembaga, menurut Lande (1973) adalah karena lembaga juga memiliki misi yang sama namun dalam kepentingan yang beda. Dengan demikian pandangan Scott (1972:18) tentang “The growth of colonial state” sebagai struktur dasar ikatan patron-klien tepat adanya, karena perluasan colonial state ke desa hanya menciptakan sejumlah peran baru dalam ikatan patron-klien. Peran baru inilah yang dimainkan para patron di tiga wilayah ketika melakukan aliansi personal saat ini.

Menyatunya para patron dengan pihak-pihak lembaga oleh aliansi personal, ini tidak terlepas dari kepentingan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan misi negara di perdesaan. Ketika pemerintah pusat berkepentingan mensukseskan paket revolusi hijau, penyatuan patron lokal dengan pihak-pihak lembaga oleh aliansi personal ini meluas di kegiatan peningkatan usaha, aliansi berlangsung mesra antar patron lokal dengan orang-orang Perbankan dan birokrat. Namun aliansi ini nampak surut ketika masalah kredit macet merebak di perdesaan, dan hal ini semakin surut ketika krisis moneter 1997 hingga memasuki era reformasi 1999. Pasca reformasi, aliansi personal antara kedua pihak kembali merebak, namun formasi sebagian patron telah beralih pasangan setelah dilakukan Pemilu bebas, dimana aliansi beralih ke pihak-pihak lembaga yang mengurus Pemilu bebas, seperti: panitia Pemilu, partai politik, dan birokrat. Fenomena ini menjadikan perkembangan aliansi personal mengarah ke dua arah kepentingan, yakni arah yang ke kepentingan aliansi politik dan aliansi yang tetap ke kepentingan aliansi ekonomi.

Arah ke aliansi politik, dimana para patron lokal dan pihak-pihak lembaga secara bersama memiliki kepentingan (baik secara struktural maupun fungsional) dalam kekuasaan. Mobilitas patron lokal yang dulunya hanya bergerak di sektor ekonomi, melihat Pemilu bebas tersebut sebagai peluang baru untuk melakukan mobilitas horizontal ke kekuasaan, selain dengan kaum birokrat. Dominannya mereka melakukan aliansi dengan lembaga politik, adalah karena menganggap memiliki kekuatan massa yang pasti, yakni para klien plus kerabatnya. Sebaliknya pihak-pihak lembaga yang secara struktural dan fungsional berkepentingan dalam pelebaran misi lembaganya hingga ke pelosok perdesaan, melihat ambisi para patron lokal tersebut sebagai peluang besar. Aliansi personal versi baru terbentuk, patron lokal yang memiliki massa di ikatan vertikal juga secara horizontal tetap jadi patron karena mampu memobilisasikan power politiknya kepada para aliansinya, dan pihak-pihak lembaga yang hanya memiliki manajemen politik dan minus power politik di pedesaan selanjutnya secara horizontal diintrodusir menjadi klien.

Arah ke aliansi ekonomi, dimana patron lokal tetap memelihara hubungan baik dengan orang-orang di lembaga ekonomi untuk kemajuan usahanya. Para patron tidak terpengaruh untuk melakukan mobilitas yang sifat oportunistik dan tanpa perhitungan oleh hal-hal yang bukan bidang mereka. Terjadinya pergeseran motif dari mobilitas ekonomi ke mobilitas politik praktis oleh sebagian patron, justru dimanfaatkan oleh para patron yang eksis ini untuk semakin mengintensifkan aliansi personalnya dengan lembaga-lembaga ekonomi lain (sektor swasta) yang sebelumnya tidak ia libatkan, dan keseluruhan aliansi personal ditujukan demi membangun rencana-rencana ekonominya.

Perbedaan motif aliansi personal ini nampak dalam respon warga masyarakat di tiga wilayah. Bagi warga desa di Amparita dan Bontorannu, nama-nama seperti Edy Slamet dan Karaeng Mile adalah nama-nama yang selama ini hanya ia kenal sebagai patron yang berlatar belakang tuan tanah, status bangsawan, dan hartawan, dengan puluhan orang klien di berbagai usaha. Pasca Pemilu bebas baru lalu, warga perdesaan harus menerima status baru kedua orang ini sebagai “Anggota Dewan” yang sangat melebihi status sebelumnya setelah keduanya berhasil lolos atau mendapatkan 1 kursi di DPRD Tk.II di Kabupaten masing-masing.

Walaupun para warga sadar bahwa ketiganya sangat intens dan berkorban banyak di saat kampanye, namun keheranan mereka tidak pernah hilang apabila membanding-bandingkan antara kapabilitas seorang politisi yang ia kenal dengan latar belakang kedua politisi baru ini. Fenomena ini akan dijelaskan pada uraian lanjut setelah mengamati dan mengobservasi kedua patron horizontal ini.

Nama Edy Slamet (42 tahun) sebelum warga desa mengangkat statusnya sangat tinggi, pria perawakan sedang ini hanya mereka kenal sebagai pemimpin spiritual tertinggi kepercayaan Tolotang. Dalam karir keemasannya, warga hanya tahu kalau pria ini lama menjadi kepala kampung (setingkat RK) dan aktif sebagai pengurus kerohanian di Kelurahan. Walau demikian, sebagai patron Edy Slamet memiliki banyak kelebihan ketimbang patron lainnya di Amparita, hal itu seperti: memiliki banyak pengikut, tuan tanah, memiliki banyak usaha (usaha tani dan di luar usaha tani), dan terpelajar. Mobilitas sosialnya sebelum jadi politisi adalah sangat dekat dengan pejabat elit di Kabupaten, dan kegiatan mobilitas sosial ini menjadikan ia menyeberang ke dunia politik.

Mobilitas horizontal yang ia lakukan sebelum terpilih menjadi anggota dewan adalah menerima tawaran DPP Partai Golkar tingkat Kabupaten yang memiliki kepentingan menang mutlak di Amparita. Walaupun secara struktural Edy tidak termasuk kader partai, namun pengurus Kabupaten memaksa merekrutnya menjadi salah satu caleg di wilayahnya, mengingat pertukaran politik dengan dirinya sangat strategis karena ia sebagai kepemimpinan spiritual dan patron yang terkenal harmoni dengan komunitasnya, segala fasilitas pun dipenuhi kedua pihak untuk misi ini. Korban-an-imbalan kedua pihak rupanya tidak sia-sia, hasil Pemilu membuktikan bahwa ia sangat pantas menjadi kader “dadakan” sebab sebanyak 5000 lebih suara atau di atas 90 % partai ini menerima suara dari mayoritas orang-orang Tolotang, Edy Slamet pun menjadi anggota dewan, apabila dahulu mobilitas vertikal yang membawanya masuk ke Pemilu bebas, maka setelah menjadi anggota dewan mobilitas itu beralih menjadi mobilitas horizontal, dimana para pejabat desa (lurah, camat, muspida, dan rekan-rekan sejawatnya) yang dahulunya menjadi rekan maka sekarang pihak ini dapat saja menjadi klien di ikatan horizontal. Mekanisme stimulan ikatan vertikal ke fungsi-fungsi yang bersifat horizontal pun sudah ia perankan dengan sempurna. Di tempat yang terpisah, mekanisme stimulan ini juga dimainkan secara sempurna oleh Karaeng Mile yang terpilih menjadi anggota dewan dari partai islam.

Mengaktualnya pola dadakan yang mengiringi proses mobilitas horizontal oleh diferensiasi vertikal dari keduanya, ini memperlihatkan semakin legalnya instanisasi kepentingan yang mendasari aliansi personal mereka. Dihubungkan dengan teori perubahan sosial, fenomena ini menurut Luhmann (1992) adalah merupakan efek dari meluasnya pola reproduksi susunan sosial dalam masyarakat, dimana secara temporal masyarakat makin menempatkan nilai improbabilitas diatas probabilitas dalam rangka mengejar percepatan di berbagai bidang kehidupan (sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, pengetahuan, dan keluarga) yang arahnya justeru lebih mengabaikan makna proses atau kesejarahan, dan semuanya akan berujung ke enlightenment atau anti proses dan anti tatanan masyarakat.

Sejauh mana pola dadakan ini dihubungkan dengan teori mobilitas sosial. Menurut Sorokin (1957) dan Ponsioen (1969) bahwa, arah mobilitas sosial vertikal dan horizontal seseorang akan berefek pada ascending atau social climbing (peningkatan) dan descending atau social sinking (penurunan). Dengan acuan teori ini, upaya-upaya Edy Slamet dan Karaeng Mile dalam mobilitas horizontalnya dipastikan hanya mengarah ke descending atau social sinking. Hal ini karena aliansi personal yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ascending atau social climbing. Ketidaksesuaian Edy Slamet adalah karena partai besar (Golkar) yang mengusungnya tidak sepadan dengan kapabilitas dia (bukan kader dan tidak memiliki pengetahuan politik yang baku) dan masyarakatnya secara sosio kultural tidak memiliki tradisi perpolitikan modern. Sedangkan ketidaksesuaian Karaeng Mile adalah karena partai yang

mengusungnya hanya partai gurem (PSI tidak memiliki basis yang jelas di Bontorannu dan partai ini baru terbentuk di saat Mile jadi calon legislatif) dan Mile juga bukan kader dan latar belakang keemasannya tidak ada, di samping itu sosio kultur masyarakatnya masih sangat tradisional untuk tujuan sebuah demokrasi. Apabila ketidaksesuaian Edy Slamet Karaeng Mile dikaitkan dengan teori Sorokin (1957) dan Ponsioen (1969) maka ketidaksesuaian itu disebabkan oleh: (1) masuknya individu dari strata sosial yang tinggi ke strata yang rendah, tanpa adanya degradasi atau disintegrasi dari pihak kelompok yang lebih tinggi strata sosialnya, dan (2) pengklasifikasian menurut kriteria rendah terhadap sebuah kelompok diantara kelompok lainnya.

Ketidaksesuaian ini tidak hanya karena kapabilitas internal dari kedua anggota dewan tersebut, namun juga hal itu nampak dari reaksi para warga di dua wilayah. Menurut informan (representasi warga di Amparita) bahwa, aliansi Edy Slamet nampaknya tidak berpengaruh sedikitpun pada perbaikan tatanan sosial ekonomi masyarakat Amparita yang masih miskin dan terbelakang. Sewaktu kampanye dahulu, isu penindasan dan perbaikan kemiskinan orang-orang Tolotang yang ia kedepankan, namun setahun lebih menjadi anggota dewan, ternyata tidak satupun janji-janji politiknya yang terbukti, hal ini seiring semakin jarang ia terlihat di tengah-tengah masyarakat yang sangat membutuhkan peranannya sebagai anggota dewan, karena masih terbelakang dan hidup miskin. Aliansi demikian menurut Legg (1983) hanya menjadikan klien sebagai aset politik dan bersifat sesaat yang pada akhirnya sang patron dijauhi para kliennya.

Sejauh mana bentuk aliansi personal dua patron ini dikaitkan dengan teori mobilitas sosial. Tentunya arah aliansi personalnya berbeda dengan kedua patron di dua wilayah, dimana arah mobilitas sosialnya lebih ke ascending atau social climbing ketimbang descending atau social sinking. Mengacu teori Sorokin (1957) bahwa, arah mobilitas sosial vertikal dan horizontal seseorang akan berefek ascending atau social climbing apabila: (1) terjadi infiltrasi individual dari seseorang yang strata rendah ke strata yang lebih tinggi, dan (2) apabila tercipta kelompok baru oleh sejumlah individu yang stratanya lebih tinggi, dan masuknya sebuah kelompok ke dalam sebuah kelompok yang strata sosialnya lebih tinggi, atau berdampingan dengan kelompok yang ada dengan strata yang sama

Sedangkan menurut Ponsioen (1969) bahwa sebagai prakondisi, mobilitas vertikal yang social climbing ini akan diikuti oleh mobilitas horizontal, yakni berupa perbaikan-perbaikan dalam seluruh sendi kehidupan manusia. Dengan mengacu kedua teori ini maka dipastikan bahwa aliansi personal patron ini mengarah ke peningkatan mobilitas sosial. Peningkatan mobilitas sosial Andi Ambran juga merupakan manifestasi dari keinginan teori kebudayaan (akulturasi), dimana yang diinginkan adalah terciptanya perubahan sosial menuju peningkatan hidup dengan pola masyarakat majemuk yang mengakulturasikan kebudayaan modern dan kebudayaan tradisional secara seimbang. Hal itu akan terjadi menurut Redfield (1959) apabila budaya tinggi (great tradition) dan budaya tradisional (little tradition) mampu menciptakan difusi timbal-balik dalam ketunggalan. Sedangkan menurut Frank (1976) apabila tercipta saling ketergantungan yang harmonis antara pola masyarakat metropolis (pola moderen) dan pola masyarakat satelit (pola tradisional) secara holistik. Kedua pemikiran ini adalah anti dualisme dan difusionisme, sebagaimana halnya arah kajian ini.

4. KESIMPULAN

Ikatan horizontal terkait dengan pergeseran pola ikatan patronase yakni ketika 2 arus hubungan horizontal terpola oleh diferensiasi vertikal, dimana aliansi personal yang mendorong arus hubungan dari patron ke klien dan jaringan koalisi yang mendorong arus hubungan klien ke patron. Namun kaitan arah juga mengalami perbedaan perkembangan. Karena di 2 wilayah aliansi hanya memobilisasi sumber daya patron ke tujuan kekuasaan

dengan memeralat kliennya, dan arah koalisi berjalan stagnan sebab mobilitasnya tidak didukung kaum patron, kondisi ini juga terkait dengan meluasnya masalah ketimpangan sosial.

REFERENSI

- Ahimsa, Putra, Hs. 1988. *Minawang: Hubungan Patron-Klien Di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Akkas, Rusli. 1995. *Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial Masyarakat Tani di Desa Watu, Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan*. Makassar; Unhas Pers.
- Alexander, J.C. 1992. Durkheim's Problem and Differentiation Theory Today. Dalam H. Haferkamp and N.J Smelser (Eds). *Social Change and Modernity*. California: California University Press.
- Amaluddin, M. 1987. *Kemiskinan dan Polarisasi Sosial: Studi Kasus Desa Bulugede, Kendal, Jateng*. Jakarta; UIP.
- Blau M. Peter. 1964. *Exchange and Power in Social Life*. U.S.A. and London; Transaction Publishers.
- Blumer, Herbert. 1972. *Symbolic Interactions*. San Fransisco; Chandler Publ. Company.
- Boissevain, Jeremi. 1966. Patronage in Sicily. *Man: Vol.1 (I)*.
----- 1969. *Patrons and Brokers*. London; The Athlone Press.
- Campbell, John. 1968. *Two Case Studies of Marketing and Patronage in Greece*. The Hague; Mouton and co
- Chabot, H.T. 1950. *Verwantschap, stand en sexe in Zuid-Celebes*. Jakarta; Groningen.
- Effendi, Rusman. 1981. *Punggawa dan Pajjama*. Makassar: PLPIIS-Unhas.
- Friedericy, H.,J. 1933. *De Standen bij De Boegineezen en Makassaren*. Holland: Gravenhage
- Haerani, Any. 1996. *Ikatan Patron-Klien, Kemiskinan, dan Pengwilayahan Komuditas Unggulan Di Jeneponto*. Makassar: Unhas.
- Haferkamp, H, dan N.J. Smelser. 1992. Social Change and Modernity (halaman 97-119) Berkeley; University of California.
- Kooreman, J.P. 1883. *De Feitelijke Toestand in het Gouver-nementsgebied van Celebes en Onderhoorigheden*. Holland.
- Legg, R. Keith. 1983. *Patrons, Client, and Politikans*. Berkeley; University of California Press.
- Lemarchand, Rene. 1972. Political Clientelism and Ethnycity in Tropical Africa: Competing Solidarities in Nation-Building. (*American Political Science Review, Vol. 65*).
- Matthes, B.F. 1885. *Over de Ada's of gewoonten der Makassaren en Boegineezen*. Holland.
- Mattulada. 1995. *Latoa: Satu Lukisan Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis (Disertasi)*. Jakarta; Universitas Indonesia.
- Minullah. 1992. *Siapa yang Menikmati Revolusi Hijau di Sidrap*. Makassar: PPS Unhas.
- Paine, Robert. 1971. *A Theory of Patronage and Brokerage*. New York; Memorial University of Newfoundland.
- Parakkasi, Asmar, A. 1992. *Eksistensi Ikatan Patron-Klien Di Tengah Kemajuan Pertanian Agrobisnis Di Wonomulyo*. Ujung Pandang; PPS. Unhas.
- Pelras, Christian, 1981. *Hubungan Patron-Klien pada Masyarakat Bugis-Makassar*. Makassar: Monografi.

- Sallatang, Arifin. 1982. *Pinggawa-Sawi: Suatu studi Sosiologi Kelompok Kecil*. Jakarta; Depdikbud.
- . 1997. *Pengwilayahan Komoditas Sebagai Konsep Pembangunan Masyarakat Pedesaan di Sulawesi Selatan*. Makassar; Unhas
- Scott, James.C. 1972. Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia. (*The American Political Science Review*, Vol. 66, No. 1).
- . 1976. *The Moral Economy of the Peasant*. New Haven: Yale University Press.
- Silverman, Sydel. 1965. *Patronage and Community-Nation Relationship in Central Italy*. Roma; Etnology Press.
- Syamsuddin, Haris. 1990. *Eksistensi Ikatan Patron-Klien Di Tengah Meluasnya Pertanian Komersial Di Maros*. Ujung Pandang; LPPM Unhas.
- Walinono, H. 1979. *Tanete: Suatu Studi Sosiologi Politik*. Ujung Pandang; Disertasi Unhas.
- Weber, Max. 1958. *From Max Weber: Essay in Sociology*. New York; Oxford University Press.
- . 1968. *Economic and Society*. New York; Bedminster.